

IMPLEMENTASI *E – BUDGETING* SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN TRANPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI

Anggi Pratama Nasution, S.E, M.Si
Atika, S.E.I, M.A

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

This research is intended to the Government at Binjai City of North Sumatra. Application of e-governance at regional work unit (SKPD) aims to strive the improvement of work performance based on several principles on good corporate governance (GCG) such as transparency and accountability on the government of Binjai City. Furthermore, this test is done by taking data to use questioners for all regional work (SKPD) in Binjai City. There are 52 people as budget user or authorthen the data is processed using some descriptive analysis methods. The result of research stated that even though the relation e budgeting is low with the accountability and transparency but the level of achievement of the use e-bugdeting has been reached well in attempting to increase the function of transparency and accountability so it is concluded that the role of system e-budgeting in increasing value of transparency and accountability on the government of Binjai City has been achieved.

Keyword : *Transparency, Accountability and E-Budgeting*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, Pengelolaan Keuangan Negara berdasar pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan berdasarkan Permendagri Nomor 51 Tahun 2010 Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya untuk menuju *Good Corporate Governace* (GCG) dapat berpedoman pada undang-undang tersebut.

Implementasi beberapa Undang-undang di Pemerintah Daerah sendiri saat ini masih juga belum dapat dijadikan acuan utama dalam menyelenggarakan *Good Corporate Governace* (GCG), khususnya pada bidang Pengelolaan Anggaran. Dampak Undang – Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 dalam perjalanannya di Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal tersebut terlihat dari beberapa hal seperti Kesiapan Pemerintah Daerah yang belum memadai dalam mengelola Anggarannya terutama yang berhubungan dengan sistem teknologi. Selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* menuntut suatu pemerintah daerah di Indonesia harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Dalam perjalannya, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang baru – baru ini telah meluncurkan sistem *e-Budgeting*.

Selanjutnya, rancangan aplikasi perangkat lunak sistem anggaran berbasis elektronik (*e-Budgeting*), juga merupakan bagian dari *e-Government* yang sesuai dengan peraturan pemerintah dengan tujuan membantu dan memudahkan dalam mengelola data Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), untuk dijadikan sebuah dokumen pengajuan anggaran RKA-SKPD yang layak dan valid sehingga

dapat mendukung keputusan manajerial dalam penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga merupakan instrumen kebijakan, anggaran daerah yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang.

Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam beberapa literatur sebelumnya masih menjadi topik pembahasan yang berkembang dimana Dalam penelitian ini sendiri nantinya Keterkaitan antara akuntabilitas dan transparansi. dalam penelitian ini difokuskan pada penganggaran, namun dibatasi pada tersedianya informasi tentang anggaran dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat, kesesuaian dengan peraturan yang ada, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam penganggaran serta sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penganggaran. Sehingga dibutuhkan unsur atau peran dalam penerapan *good corporate governance* (GCG).

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran merupakan suatu rencana pemerintah daerah yang memuat rencana penerimaan maupun pengeluaran dalam periode tertentu. Anggaran haruslah dikelola dengan baik agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Menurut Pramono H, dkk. (2010: 488), yang dimaksud dengan anggaran adalah: "Pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial". Hal ini berarti bahwa anggaran tersebut merupakan besaran biaya yang akan digunakan dalam pencapaian kinerja dalam satu periode tertentu. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa : Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa penganggaran dalam organisasi public khususnya pemerintahan merupakan tahapan yang cukup kompleks karena penganggaran pada pemerintahan terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program atau kegiatan yang akan dilakukan dalam satu periode pemerintahan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Whicker (2002 : 1359) bahwa "*budget are used to implement both economic policy goal and specific program needs (Anggaran digunakan untuk melaksanakan tujuan kebijakan ekonomi dan kebutuhan program yang spesifik)*.

Anggaran sebagai salah satu alat bantumanajemen memegang peranan cukup penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Menurut Mardiasmo (2002; 61) mengemukakan bahwa anggaran adalah: "Merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang akan dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran." Anggaran merupakan rencana kerja suatu perusahaan yang disusun untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan pada program-program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan pengertian anggaran menurut Sony Yuwono, dkk

(2005 : 27) adalah sebagai berikut: "Suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi." Anggaran merupakan rincian kegiatan perolehan dan penggunaan sumber-sumber yang dimiliki dan disusun secara formal dan dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Anggaran disebut juga sebagai perencanaan keuangan organisasi.

Menurut Darise (2008:146), penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut. Siklus anggaran meliputi empat tahap yang diungkapkan menurut Mardiasmo (2009:70) yang terdiri atas:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang didasari oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Terkait dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya dilakukan penaksiran pendapatan terlebih dahulu.

2. Tahap Ratifikasi

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit. Pimpinan eksekutif dituntut memiliki integritas serta kesiapan mental yang tinggi. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap Implementasi

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemui banyak masalah.

Anggaran daerah atau APBD merupakan alat kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai alat kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibagi dalam 4 tahap, yaitu:

- a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
- b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD
- c. Penyusunan RAPBD
- d. Pembahasan dan Penetapan APBD

Selanjutnya hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu diajukan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan dan kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengajuan kepada DPRD ini dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) guna dibahas dan disetujui oleh DPRD, sehingga penetapannya dapat dituangkan di dalam peraturan daerah (Perda).

Sesuai dengan paragraf penjabar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan mengenai Perencanaan dan Penganggaran yang disebutkan bahwa : APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik “pendapatan” maupun “belanja” juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran juga perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

B. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Ada beberapa pengertian tentang transparansi publik yaitu : Menurut Andrianto (2007) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut : “Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.” Menurut Hafiz (2010) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut : “Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah tersebut.

1. Dimensi Transparansi

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Menurut Krina (2003) prinsip ini menekankan kepada 2 aspek :

- a. Komunikasi publik oleh pemerintah
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi
 - Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:
 - a. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
 - b. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
 - c. Kemudahan akses informasi
 - d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) menurut Suherman (2007) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2004), menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.”

Dari kedua definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutamabidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju *clean goverment* atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

1. Sifat Akuntabilitas

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

- a) Sumber daya finansial
- b) Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi
- c) Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
- d) Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

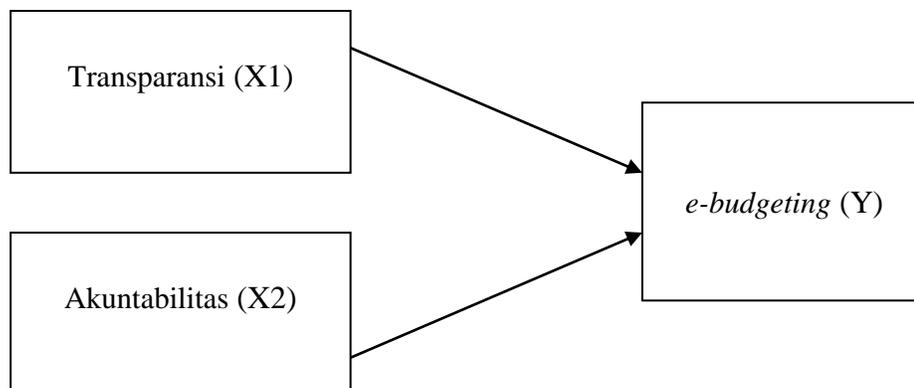
- a) *Probability and legality accountability* Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).
- b) *Process accountability* Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).
- c) *Performance accountability* Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).
- d) *Program accountability* Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).
- e) *Policy accountability* Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

D. Hipotesis Penelitian & Kerangka Konseptual

Hipotesis merupakan penjelasan semenstara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi (Erlina dan Mulyani, 2007). Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran sistem *e-budgeting* dalam meningkatkan nilai Transparansi pada Pemerintah Kota Binjai Telah Tercapai.
2. Peran sistem *e-budgeting* dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Binjai Telah Tercapai.

Secara empiris penulis menjelaskan bentuk kerangka konseptual pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar diatas, maka dihipotesisnya adalah

1. Bagaimana Penerapan E – Budgeting Dalam Meningkatkan Fungsi Transparansi.
2. Bagaimana Penerapan E – Budgeting Dalam Meningkatkan Fungsi Akuntabilitas.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kausal (*causal*), yaitu untuk melihat hubungan beberapa variabel yang belum pasti.

A. Populasi dan Sampel

Sumber data dalam penelitian ini adalah 52 orang Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara ditahun 2018.

B. Teknik Analisis Data

Statistik deskriptif umumnya digunakan peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimum dari jawaban yang didapat dari kuisisioner. Selain itu, Dasar Pengambilan keputusan dalam uji chi – square dapat dilakukan dengan melihat nilai output Chi – square test. Dalam pengambilan keputusan akan berpedoman pada nilai Asymp.Sig dengan batas kritis yakni 0,05 dengan melihat nilai chi-square test dengan chi square tabel

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Instrumen Penelitian

Berikut hasil dari Uji Reabilitas dalam penelitian ini.

a. Uji Validitas

Tabel. 4.1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Instrumen	r Hitung	R Tabel	Ket
E–Budgeting	E–Budgeting	0,416	0,232	Valid
	E–Budgeting	0,561	0,232	Valid
	E–Budgeting	0,306	0,232	Valid
	E–Budgeting	0,347	0,232	Valid
	E–Budgeting	0,308	0,232	Valid
	E–Budgeting	0,598	0,232	Valid
	E–Budgeting	0,265	0,232	Valid
Akuntabilitas	Akuntabilitas	0,497	0,232	Valid
	Akuntabilitas	0,379	0,232	Valid
	Akuntabilitas	0,442	0,232	Valid
	Akuntabilitas	0,540	0,232	Valid
	Akuntabilitas	0,481	0,232	Valid
	Akuntabilitas	0,361	0,232	Valid
	Akuntabilitas	0,390	0,232	Valid
Transparansi	Akuntabilitas	0,235	0,232	Valid
	Transparansi	0,317	0,232	Valid
	Transparansi	0,423	0,232	Valid

	Transparansi	0,482	0,232	Valid
	Transparansi	0,428	0,232	Valid
	Transparansi	0,352	0,232	Valid
	Transparansi	0,385	0,232	Valid
	Transparansi	0,582	0,232	Valid

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa nilai validitas untuk semua pertanyaan E-Budgeting, Akuntabilitas dan Transparansisemuanya Valid.

b. Uji Reabilitas

Berikut hasil dari Uji Reabilitas dalam penelitian ini.

Tabel. 4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach's	Batas Reliabilitas	Ket
Implementasi E- Budgeting	0,606	0,6	Reliabel
Akuntabilitas	0,643	0,6	Reliabel
Transparansi	0,630	0,6	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada 30 item pernyataan dengan diketahui bahwa nilai semua variabel pada *Cronbach's Alpha* sebesar $> 2,30$ sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk pernyataan melalui adalah reliabel / handal dan bisa diterima.

2. Statistik Deskriptif

a. Statistik Deskriptif Implementasi E-Budgeting

Adapun Implementasi E-Budgeting pada Pemerintah Kota Binjai ditampilkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 4.3 Statistik Deskriptif Impelentasi E-Budgeting
IMPLEMENTASI_E-BUDGETING**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Telah Tercapai	28	53.8	53.8	53.8
Sangat Ketercapaian	24	46.2	46.2	100.0
Total	52	100.0	100.0	

Dari tabel diatas, diketahui bahwa sebesar 54,8% responden menyebutkan Impelentasi E-Budgeting Telah Tercapai Pada Pemerintah Kota Binjai dan 46,2% responden menyatakan Impelentasi E-BudgetingSangat Tercapai Pada Pemerintah Kota Binjai.

b. Statistik Deskriptif Akuntabilitas

Adapun Statistik Deskriptif Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Binjai ditampilkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 4.4 Statistik Deskriptif Akuntabilitas
AKUNTABILITAS**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Tercapai	19	36.5	36.5	36.5
Telah Tercapai	33	63.5	63.5	100.0
Total	52	100.0	100.0	

Dari tabel diatas, diketahui bahwa sebesar 36,5% responden menyebutkan Impelentasi Akuntabilitas Cukup Tercapai Pada Pemerintah Kota Binjai dan 63,5% responden menyatakan AkuntabilitasTelah Tercapai Pada Pemerintah Kota Binjai.

c. Statistik Deskriptif Transparansi

Adapun Statistik Deskriptif Transparansi pada Pemerintah Kota Binjai ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel.4.5 Statistik Deskriptif Transparansi

		TRANSPARANSI			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup Tercapai	7	13.5	13.5	13.5
	Telah Tercapai	45	86.5	86.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Dari tabel diatas, diketahui bahwa sebesar 13,5% responden menyebutkan Impelentasi Transparansi Cukup Tercapai Pada Pemerintah Kota Binjai dan 86,5% responden menyatakan TransparansiTelah Tercapai Pada Pemerintah Kota Binjai.

3. Implementasi E- Budgeting Dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Implementasi E-Budgeting dalam meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah di Kota Binjai dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 4.6 Crosstab Implementasi E-Budgeting Dalam Meningkatkan Akuntabilitas
AKUNTABILITAS * IMPLEMENTASI_EBUDGETING Crosstabulation**

		IMPLEMENTASI_EBUDGETING		Total
		Telah Tercapai	Sangat Ketercapaian	
AKUNTABILITAS	Cukup Tercapai	9	10	19
	Telah Tercapai	19	14	33
Total		28	24	52

Dari Tabel diatas, diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) orang Telah Tercapai menerapkan implementasi E-Budgeting namun Akuntabilitasnya Cukup Tercapai dan terdapat 10 (sepuluh) orang sangat tercapai menerapkan implementasi E-Budgeting namun Akuntabilitasnya Cukup Tercapai

Selanjutnya, terdapat 19 (sembilan belas) orang telah tercapai implementasi E-Budgeting dan akuntabilitasnya juga telah tercapai dan terdapat 14 (empat belas) orang sangat tercapai implementasi E-Budgetingnya namun akuntabilitasnya telah tercapai.

Untuk mengetahui tingkat pengaruhnya antara Implementasi E-Budgeting terhadap Akuntabilitas dapat diketahui dari uji data Chi Square dibawah ini:

Tabel 4.7
Uji Chi-Square Implementasi E-Budgeting Dalam Meningkatkan Akuntabilitas
Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.506 ^a	1	.477		
Continuity Correction ^b	.178	1	.673		
Likelihood Ratio	.505	1	.477		
Fisher's Exact Test				.568	.336
Linear-by-Linear Association	.496	1	.481		
N of Valid Cases ^b	52				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,77.

b. Computed only for a 2x2 table

Pada penjelasan tabel diatas, diketahui bahwa nilai Asump.Sig sebesar 0,477 yang menunjukkan bahwa $0,477 > 0,05$ artinya tidak ada pengaruh antara Implementasi E-Budgeting terhadap Akuntabilitas pada pemerintah Kota Binjai. Selajutnya tingkat keeratan antara Pengaruh Implementasi E-Budgeting terhadap Akuntabilitas pada pemerintah Kota Binjai dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
(Symmetric Measures) Tingkat Keeratan Implementasi E-Budgeting Dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.098	.477
N of Valid Cases	52	

Pada tabel diatas, diperoleh nilai *contingency Coefficient* sebesar 0,098 yang menunjukkan tingkat keeratan implementasi E-Budgeting terhadap Akuntabilitas bernilai rendah pada Pemerintah Kota Binjai.

4. Implementasi E- Budgeting Dalam Meningkatkan Transparansi

Implementasi E-Budgeting dalam mengingatkan transparansi pada pemerintah di Kota Binjai dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Implementasi E-Budgeting Dalam Meningkatkan Transparansi
TRANSPARANSI * IMPLEMENTASI_EBUDGETING Crosstabulation

		IMPLEMENTASI_EBUDGETING		Total
		Telah Tercapai	Sangat Ketercapaian	
TRANSPARANSI	Cukup Tercapai	2	5	7
	Telah Tercapai	26	19	45
Total		28	24	52

Dari Tabel diatas, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) orang Telah Tercapai menerapkan implementasi E-Budgeting namun Transparansinya Cukup Tercapai dan terdapat 5 (lima) orang sangat tercapai menerapkan implementasi E-Budgeting namun Transparansinya Cukup Tercapai.

Selanjutnya, terdapat 26 (Dua puluh enam) orang telah tercapai implementasi E-Budgeting dan Transparansinya nya juga telah tercapai dan terdapat 19 (Sembilan belas) orang sangat tercapai implementasi E-Budgetingnya namun Transparansinya nya telah tercapai.

Untuk mengetahui tingkat pengaruhnya antara Implemetasi E-Budgeting terhadap Transparansi dapat diketahui dari uji data Chi Square dibawah ini:

Tabel. 4.10
Uji Chi-Square Implementasi E-Budgeting Dalam Meningkatkan Transparansi
Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.079 ^a	1	.149		
Continuity Correction ^b	1.070	1	.301		
Likelihood Ratio	2.114	1	.146		
Fisher's Exact Test				.227	.151
Linear-by-Linear Association	2.039	1	.153		
N of Valid Cases ^b	52				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,23.

b. Computed only for a 2x2 table

Pada penjelasan tabel diatas, diketahui bahwa nilai Asump.Sig sebesar 0,149 yang menunjukkan bahwa $0,149 > 0,05$ artinya tidak ada pengaruh antara Implementasi E-Budgeting terhadap Transparansi pada pemerintah Kota Binjai. Selajutnya tingkat keeratan antara Pengaruh Implementasi E-Budgeting terhadap Transparansi pada pemerintah Kota Binjai dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11
(Symmetric Measures) Tingkat Keeratan Implementasi E-Budgeting Dalam Meningkatkan
Transparansi

Symmetric Measures		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.196	.149
N of Valid Cases		52	

Pada tabel diatas, diperoleh nilai *contingency Coefficient* sebesar 0,196 yang menunjukkan tingkat keeratan implementasi E-Budgeting terhadap Transparansi bernilai rendah pada Pemerintah Kota Binjai.

5. PEMBAHASAN

Pada Hakikatnya, suatu sistem dibentuk untuk memudahkan suatu organisasi dalam menjalankan proses pelaksanaan aktivitas organisasinya. Selanjutnya untuk tahapannya, setiap sistem sendiri harus dapat menyesuaikan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dari setiap penggunaannya. Dari hasil penelitian, disebutkan bahwa tidak ada pengaruh Implementasi E-Budgeting dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi, hal tersebut disebabkan karena penerapan E-Budgeting pada Pemerintah Kota Binjai baru berjalan 1 (satu) tahun sehingga ukuran pengaruhnya belum dapat dinilai secara maksimal dan hal tersebut diperjelas dengan hasil hubungan antara E-Budgeting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi juga bernilai rendah.

Selain itu, sebelum adanya penggunaan e-budgetting selama ini pemerintah kota Binjai mendapatkan hasil opini audit dari BPK yang baik yaitu tahun 2016, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 2015, Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Selanjutnya, walaupun hubungan bernilai rendah, tingkat ketercapaian penggunaan e-budgetting telah sangat tercapai dengan baik dalam upaya meningkatkan fungsi akuntabilitas dan transparansi, artinya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Binjai telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan penggunaan e-budgeting dalam mencapai akuntabilitas dan nilai transparansi pada setiap OPD Pemerintah Kota Binjai.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran sistem *e-budgeting* dalam meningkatkan nilai Transparansi pada Pemerintah Kota Binjai telah tercapai.
2. Peran sistem *e-budgeting* dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Binjai telah tercapai.

B. Saran

1. Agar pemerintah daerah kota Binjai agar terus dapat meningkatkan fungsi dari E-Budgeting untuk seluruh aspek kebutuhan pemeritan kota binjai.
2. Agar pemerintah daerah kota binjai perlu melakukan proses monitoring evaluasi secara berkala dalam menguatkan hasil dari harapan pelaksanaan penerapan sistem e-budgeting pada pemerintah kota binjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Good Governement : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Palangkaraya. Bayu Medan.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT INDEKS.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hafiz, Abdul Tanjung. 2010. *Akuntansi, Tranparansi dan Akutabilitas Keuangan Publik. (Sebuah Tantangan)*.
- Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
- Krina, P. 2003. *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi. Jakarta : Sekretariat Good Publik Governance*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. 2004. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Suatu Sarana Good Governance
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pramono H, dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sa'adah, Binti. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E – Government (Studi Tentang Penganggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Bilitar)*.
- Toha, Suherman. 2007. *Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Undang – Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999.
- Umar, Husein, 2008, *Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan.*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Whicker, Marcia Lynn. 2002, *Federal Deficit and Financing the National Debt. In: Handbool of Fiscal Policy*. New York: Marcel Dekker Inc.
- Yuwono, S, I.T. Agus, dan Hariyadi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Bayumedia Publising, Malang